

ABSTRAK

Jalan sebagai sarana transportasi mutlak diperlukan untuk menunjang pembangunan yang semakin kompleks, tidak terkecuali dengan Kabupaten Tegal yang merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang terlewati oleh Proyek Jalan Tol Trans Jawa. Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Tegal membutuhkan lahan yang panjang dan secara otomatis akan melibatkan banyak pihak dan muncul berbagai masalah terkait dengan pembebasan lahan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa: 1) Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum jalan tol di Kabupaten Tegal. 2) Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. 3) Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Tegal.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka, sedangkan metode analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1) Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimulai dari tahap perencanaan, penetapan lokasi, pembentukan panitia pengadaan tanah, penilaian harga, musyawarah, tahap keputusan dan pemberian ganti rugi. 2) Penyelesaian sengketa pengadaan tanah pembangunan kepentingan umum jalan tol di Kabupaten Tegal dapat dilakukan dengan jalur pengadilan dan jalur musyawarah. Masyarakat Tegal lebih banyak memilih jalur musyawarah karena alasan lebih hemat biaya. Penyelesaian sengketa dengan musyawarah dilakukan secara terus-menerus dan intens sampai tercapai kesepakatan yang adil. 3) Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Tegal adanya campur tangan pihak ketiga, adanya jual beli lahan bebas, terjadinya proses waris yang belum dibalik nama, penetapan harga ganti rugi yang belum sesuai dan pengetahuan masyarakat yang kurang dalam bidang pertanahan dan pembangunan kepentingan umum. Solusi yang diambil panitia adalah dengan sosialisasi dan musyawarah secara intens sampai terjadi kesepakatan yang adil untuk kedua belah pihak.

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum,

ABSTRACT

Roads as a means of transportation are absolutely necessary to support the increasingly complex development, including Tegal Regency, which is one of the Regencies in Central Java Province which is passed by the Trans Java Toll Road Project. Construction of the Toll Road in Tegal requires a long land and will involve many parties and various problems arise regarding land acquisition.

The purpose of this study is to analyze: 1) Land acquisition for the construction of public interest in toll roads in Tegal Regency. 2) Settlement of disputes in the implementation of land acquisition for the development of public interests. 3) Obstacles and solutions for land acquisition for public interest in Tegal Regency.

The approach method in this study is empirical juridical, namely research that focuses on individual or community behavior in relation to law. The data used are primary and secondary data obtained through interviews and literature studies, while the method of data analysis is carried out by descriptive analysis.

The results of the research conclusions are: 1) The implementation of land acquisition for public interest starts from the planning stage, location determination, establishment of land acquisition committee, price assessment, deliberation, stage of decision and compensation. 2) Settlement of toll road public interest development land dispute resolution in Tegal Regency can be done by court and deliberation. The Tegal community chooses more deliberations because they are more cost effective. Settlement of disputes with deliberation is carried out continuously and intensely until a fair agreement is reached. 3) Obstacles and solutions in the implementation of land acquisition for public interest in Tegal Regency due to the existence of third party interference, the sale and purchase of free land, the occurrence of inheritance processes that have not been reversed, the determination of compensation prices that have not been matched and lack of community knowledge land and public interest development. The solution taken by the committee was intense socialization and deliberation until a fair agreement was reached for both parties

Keywords: Land Disputes, Land Procurement, Public Interest,